

Pengaruh Perilaku Kepala Desa dalam Meningkatkan Good Governance dan Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa

Fisca Amanda Ramadhana¹⁾, Nur Halizah²⁾, Rifki Aditya³⁾, Julia Ivanna⁴⁾

^{1,2,3,4)}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: rifkyady@rhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepala desa dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang adil, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik berjalan baik secara politik maupun administratif untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi dana investasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan Kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi pemimpin tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan orang yang di pimpin baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka kita harus terlebih dahulu mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Karena pemerintahan yang bersih merupakan kunci dari terciptanya pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Desa, Kepala Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Yang baik

ABSTRACT

This research was made with the aim of knowing how much influence the village head has in creating a climate of good governance. Good governance is the implementation of development management that is strong and responsible in accordance with the principles of democracy and a fair market, so that good governance works both politically and administratively to prevent misuse and corruption of investment funds. This study uses qualitative research with descriptive methods. The government position that is closest to the community is the village head as the coach, protector, and community service which plays a very important role in encouraging the community to participate in village development. The implementation of Village Government is a subsystem in the implementation of the National Government system, so that the Village has the authority to regulate and manage the interests of its community. In an effort to realize effective leadership, leadership must be carried out according to its function. The function of the leader does not only take place in two directions, but also embodies the implementation of effective human relations between the leader and the person being led both in participating in making decisions and in implementing them. To realize good governance, we must first create clean governance. Because clean government is the key to creating good governance.

Keywords: Village, Village Head, Village Government, Good Governance

PENDAHULUAN

Kepala desa adalah seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis atau adat oleh warganya dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk mengatur, mendukung dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan desa, sehingga kedudukan kepemimpinan desa mempunyai arti penting berdampak pada kemajuan dan perkembangan pembangunan desa. (Misah et al., 2019)

Kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu dapat menjadi pemimpin melalui tindakan terus menerus untuk mempengaruhi mereka yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Saat ini desa telah memasuki era pembaharuan yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Salah satu kunci penting dalam pembangunan nasional adalah sosok pemimpin, hal ini merupakan hal penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tertata dengan baik atau biasa disebut *good governance*.

Desa merupakan satuan pemerintahan kabupaten/kota terendah. Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai badan pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pengurus desa. Badan desa berperan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. (Heriyanto, 2011)

Menurut Suhendar, *Good governance* adalah tata kelola yang mencakup semua mekanisme, proses, dan kelembagaan yang dilalui oleh orang dan kelompok masyarakat untuk mewakili kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, dan menjembatani perbedaannya. (Safitri et al., 2023) Selain itu, pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang mengedepankan kepentingan orang banyak.

Good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang adil, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik berjalan baik secara politik maupun administratif untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi dana investasi. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipatuhi di beberapa instansi pemerintahan yang penting, antara lain prinsip-prinsip tersebut. Partisipasi Masyarakat, Penegakan Hukum, Transparansi, Orientasi Konsensus, Kesetaraan bagi Semua Warga Negara, Efisiensi dan Efektivitas, Akuntabilitas dan Visi Strategis.

Tetapi nyatanya di Indonesia ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa nya masih rendah, ada juga beberapa desa yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada kepala desa nya. Untuk mencapai Good Governance atau tata pemerintahan yang baik tentu saja para tokoh pemerintahan ini selaku kepala desa beserta staff harus bisa memberikan pelayanan serta transparansi kerja kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pengurusan berkas, pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat akan menilai secara langsung terhadap pemerintahan yang ada, berdasarkan program-program yang diberikan kepada mereka. Tentu saja hal ini akan memiliki dampak buruk terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat dikemudian hari apabila tidak hal tersebut tidak

terlaksana. Tidak hanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harus dijaga melainkan transparansi kerja pun sangat dibutuhkan. Begitupun sebaliknya apabila pemerintahan desa setempat dapat memberikan pelayanan yang baik serta transparansi kerja yang baik maka hubungan baik pun akan terjalin serta masyarakat pun akan merasa puas dan sejahtera. (Kawwami & Islamia, 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. penelitian kualitatif adalah untuk dapat memahami dan menafsirkan interaksi sosial. penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. (Fauzi & dkk, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan dan sebagai indicator dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Dalam upaya mewujudkan Kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi pemimpin tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan orang yang di pimpin baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Pemimpin tidak sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaan, akan tetapi pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinan bukan sebagai pelaksana seluruh fungsi kepemimpinan secara integral.

Menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin adalah sebagai berikut

- a. Pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masadepan.
- b. Sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik.
- c. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.

- d. Kecerdasan, artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari pengikutnya, tetapi tidak terlalu banyak melebihi kecerdasan pengikutnya.
- e. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, sehingga pemimpin akan selalu energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya.
- f. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan, dalam arti bahwa pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya.

Keberadaan *Good Governance* timbul dari banyaknya penyimpangan pada pelaksanaan pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan urusan public sifatnya non-parsipatif, sentralistis, serta tidak akomodatif kepada kepentingan publik, membuat hilangnya kepercayaan kepada rezim pemerintahan. Banyaknya rakyat putus harapan terhadap pelaksanaan pemerintahan tersebut, alhasil menimbulkan tuntutan guna menyempurnakan fungsi pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka kita harus terlebih dahulu mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), karena pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) merupakan kunci dari terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terutama masalah korupsi, kolusi dan nepotisme. (Diah et al., 2020)

Governance merupakan termitologi untuk menggantikan istilah *government* yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Pusat perhatian dari *governance* adalah perbaikan kinerja atau kualitas. *Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Good and Service*.

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan issue yang paling mengedepan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan globalisasi. Arti 'Good' dalam *Good Governance* mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena agar *good governance* menjadi kenyataan dan berhasil dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik integritas, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. (Bahrudin, 2015)

Upaya-upaya strategis untuk mengembangkan *Good Governace* diantaranya: Pengembangan serta perbaikan pelayanan public, Pembinaan birokrasi pemerintahan, Masyarakat madani yang kompeten serta partisipatif, serta Upaya penguatan otonomi daerah. Fungsi kepala desa dalam menciptakan *good governance* mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi administrasi pembangunan, fungsi administrasi pemerintahan dan fungsi administrasi kemasyarakatan. Peran kepala desa dalam mewujudkan *good governance* penuh dengan tanggungjawab dan sesuai dengan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.

SIMPULAN

Untuk mencapai *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik tentu saja para tokoh pemerintahan ini selaku kepala desa beserta staff harus bisa memberikan pelayanan serta transparansi kerja kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pengurusan berkas, pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pemberdayaan masyarakat. Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku pembina pengayom dan pelayanan masyarakat yang sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka kita harus terlebih dahulu mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Karena pemerintahan yang bersih merupakan kunci dari terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). merupakan issue yang paling mengedepankan dalam mengelola administrasi publik dewasa ini. Upaya-upaya strategis untuk mengembangkan *Good Governance* yaitu: pengembangan serta perbaikan pelayanan publik, pembenahan birokrasi pemerintahan, masyarakat madani yang kompeten serta partisipatif, serta upaya penguatan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, A. (2015). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 135–146. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/268/325>
- Diah, N. P., Astuti, P., Gde, P., & Yasa, A. S. (2020). Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(8), 1–12.
- Fauzi, A., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. In Suparyanto dan Rosad.
- Hidayatullah, U. I. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto*.
- Hidayanah. (2020). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Masyarakat Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto*.
- Heriyanto, A. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–17.
- Kawwami, M. A., & Islamia, P. (2023). Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 2(1), 31–43.
- Maulana, H. M. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melalui Skema Penyusunan Dokumen RPJMDesa (Studi di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*
- Misah, M., Rares, J. J., & Dengo, S. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(76), 40–47.
- Pramusinto, dkk. (2011). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara,

11(1), 1-13 Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyani, A. (2023). *PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA : STUDI KASUS DI DESA BOTO , KECAMATAN BANCAK ,*. 3(1), 1–11.